

PROFIL PEJABAT STRUKTURAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Nama : Dra. Monika Nur Lastiyani, MM
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Katholik
 Instansi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
 Unit : -
 Jabatan : Kepala Dinas
 Pendidikan : S-2 Magister Manajemen
 Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina Utama Madya/ IV / d

A. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

NO	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK	Eselon	Instansi
1	Kepala Seksi Data dan Teknologi Informasi	2007-04-09	155/Pem.D/UP/D.4	4A	Kantor Arsip Daerah
2	Kepala Seksi Data dan Teknologi Informasi	2007-04-09	363/Pem.D/UP/D.4	4A	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
3	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	2012-10-30	400/Pem.D/UP/D.4	3A	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	2014-12-24	302.2/Pem.D/UP/D.4	3A	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
5	Kepala Balai Layanan Perpustakaan	2015-12-23	445/Pem.D/UP/D.4	3A	Balai Layanan Perpustakaan
6	Kepala Bidang Pelayanan dan Pelestarian	2016-01-26	012/Pem.D/UP/D.4	3A	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
7	Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	2018-01-12	009/Pem.D/UP/D.4	2A	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
8	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2019-01-03	369/Pem.D/UP/D.4	2A	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	SEKOLAH/UNIVERSITAS	JURUSAN	TAHUN LULUS	STTB
1	SD NEGERI Lempuyangwangi II	SEKOLAH DASAR	1975	XII Aa 04535
2	SMP Pangudi Luhur I Yogyakarta	SMP	1979	XII Bb 388175
3	SMEA Negeri 2 Yogyakarta	SMA Tata Usaha	1982	13 OC os 0071619
4	IKIP Sanata Dharma Yogyakarta	S-1 Akuntansi	1987	2899/SD/FP/IPS/S1/87
5	Univeristas Sarhaa Wuyata Tamansiswa	S-1 Magister Manajemen	2009	010171/Ps



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MONIKA NUR LASTIYANI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **106712**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.590.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m²/48 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 621 m²/621 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
5. Tanah Seluas 142 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
6. Tanah Seluas 267 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 153.350.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.900.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.700.000
3. MOTOR, HONDA GL Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. MOTOR, YAMAHA B66 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



25.750.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	642.350.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	140.475.190
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.526.175.190
III. HUTANG	Rp.	750.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.776.175.190

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.